

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Timor Leste merupakan negara yang paling muda di kawasan Asia Tenggara, dimana Timor Leste mulai resmi memisahkan diri dari negara Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002 pasca Presiden Indonesia Ketiga pada saat itu B.J. Habibie mengeluarkan referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 terhadap Timor Leste. Tak berselang lama pasca memisahkan diri dari Indonesia lalu menjadi Negara Republik Demokratik Timor, Timor Leste dihadapkan dengan permasalahan konflik kekerasan antar geng di ibukota Dili.

Akibat kejadian ini memakan ratusan rumah terbakar, melukai ribuan orang bahkan menimbulkan 20 orang tewas dan menyebabkan warga sekitar mendirikan kamp pengungsian. Pecahnya kekerasan merupakan ancaman bagi stabilitas negara liberal baru. Pemicu kekerasan sering kali digambarkan sebagai anggota angkatan bersenjata Timor yang tidak puas yang mengklaim diskriminasi di eselon atas organisasi (hampir 600 anggota diberhentikan dari dinas pada Maret 2006), hal ini juga terkait dengan perpecahan yang mendalam dan pertikaian politik di dalam partai yang berkuasa, Front Revolusioner untuk Timor Timur Merdeka (Fretilin)¹.

Tidak hanya masalah humanitarian, Timor Leste juga memiliki masalah pada bidang ekonomi. Dimana menurut UNDP Timor Leste dinyatakan menjadi negara termiskin di Asia Tenggara. Pada laporannya, negara ini hanya memiliki produk domestik bruto sekitar \$478 per kapita tahunan dan harapan hidup hanya 57 tahun. Hal ini menjadikan Timor Leste mendapatkan ranking terendah dibawah 20 negara di Asia dalam indeks pembangunan Manusia. Tingkatan ranking Timor Leste setara dengan negara - negara seperti Rwanda, Bangladesh, Angola, Mozambik, dan Guinea - Bissau yaitu 0.42². Kualitas sumber daya manusia negara Timor Leste adalah faktor utamanya. Lebih dari separuh warga negaranya buta

¹ Michael Leah, 2017, *Nation-Building and National Identity in Timor-Leste*, New York: Routledge, Hal. 2..

² United Nations Development Programme (UNDP), *The East Timor Human Development Report*, 2002

huruf bahkan 50% mengalami kekurangan gizi. Adapun banyak penduduk yang menderita trauma pasca kejadian 1999.

Ketidakstabilan negara Republik Demokratik Timor Leste mengakibatkan negara ini tidak dapat menjadi bagian dari *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) meskipun sudah menjadi negara yang berdaulat. Hal ini karena Timor Leste harus memenuhi syarat negara anggota ASEAN yang mana tertulis adanya pengakuan dari seluruh negara anggota lain. Dalam hal ini, terdapat satu negara anggota yang menolak Timor Leste masuk menjadi negara anggota ASEAN yaitu Singapura. Penasehat ASEAN saat itu, Edmund Sim mengatakan bahwa “*Basically, 9 of 10 ASEAN members support the immediate start negotiations for Timor Leste to Join ASEAN, but Singapore doesn’t.*” Singapura menganggap Timor Leste belum memiliki standar ekonomi yang sesuai untuk menjadi negara anggota ASEAN³.

Pada bidang ekonomi, Timor Leste hanya menghasilkan sekitar 1.442 miliar dolar Amerika yang mana angka tersebut dibawah dari Singapura, Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Meskipun dulunya Timor Leste adalah negara penghasil minyak bumi dan gas nasional terbesar dan 90% pendapatan negara berasal dari hal tersebut akan tetapi diprediksi Timor Leste tidak memiliki pendapatan lain lagi⁴. Dengan keterbatasan sumber daya alam dan manusia menjadikan negara Timor Leste masih dianggap kurang dalam bagian anggota ASEAN. Selain negara anggota, pejabat fungsional seperti aktor non negara, ahli kawasan Asia Tenggara, organisasi non pemerintah, Menteri Luar Negeri ASEAN serta kalangan epistemik yang ikut berpartisipasi dalam forum diskusi yang diadakan *The Asia Foundation* menyatakan jika

³ Danius Reinaldo Seran, dkk, DUKUNGAN INDONESIA TERHADAP TIMOR LESTE DALAM UPAYA MENJADI ANGGOTA ASEAN, *Solidaritas*, Vol. 9, No. 2.

⁴ Muh. Irham, Singapura Getol Menolak Timor Leste Gabung di ASEAN, Ternyata Ini Alasannya”, diakses dalam <https://makassar.tribunnews.com/2022/04/25/singapura-getol-menolak-timor-leste-gabung-di-asean-ternyata-ini-alasannya> (03/04/2023, 17:34 WIB)

ASEAN belum siap dalam menghadapi beban berat ketika Timor Leste menjadi anggota saat ini⁵.

Langkah lain yang telah ditempuh oleh Timor Leste adalah mendirikan Sekretariat Nasional ASEAN di Dili. Pendirian sekretariat ini, bersama dengan pengajuan aplikasi resmi kepada ASEAN, menunjukkan bahwa upaya Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN semakin konkret dan serius. Di bidang politik, Timor Leste juga melakukan berbagai kunjungan penting ke negara-negara anggota ASEAN guna memperoleh dukungan serta meyakinkan negara-negara di kawasan. Selain itu, Timor Leste aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh ASEAN. Sementara di sektor ekonomi, Timor Leste menjalin kerja sama dengan Indonesia dengan mendatangkan investor asal Indonesia untuk membangun berbagai infrastruktur, yang bertujuan memperkuat dan meningkatkan perekonomian domestik Timor Leste.

Setelah 21 tahun kemerdekaan Timor Leste tetap menjadi negara termiskin di ASEAN yang mana Timor-Leste berada pada peringkat 171 secara global dalam indeks 2020, dan di kawasan Asia-Pasifik Timor-Leste menempati peringkat ke-40 dari 42 negara, dengan skor keseluruhan jauh di bawah rata-rata regional dan dunia⁶. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Timor-Leste tetap lamban dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, menurut laporan resmi Bank Dunia tahun 2020⁷.

⁵ Zegi Dias Prameswari, "PENYEBAB PENOLAKAN SINGAPURA TERHADAP KONSENSUS KEANGGOTAAN TIMOR LESTE DI ASEAN", Skripsi, Sarjana Hubungan Internasional, Universitas Airlangga

⁶ Tempo.co. "5 Negara Termiskin di Asia Tenggara Berdasarkan PDB per Kapita 2024, Ada Indonesia?", diakses dalam <https://www.tempo.co/internasional/5-negara-termiskin-di-asia-tenggara-berdasarkan-pdb-per-kapita-2024-ada-indonesia--10016> (24/10/2023 17.21 WIB)

⁷ World Bank. Timor-Leste Economic Grow Forecast to Pick Up in 2024-2025 Amid Easing Inflation, Stable Fiscal Outlook. Diakses dalam <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2024/02/27/timor-leste-economic-grow-forectast-to-pick-up-in-2024-2025-amid-easing-inflation-stable-fiscal-outlook> (22/01/2024 20.12 WIB)

Namun, perjalanan menuju keanggotaan ASEAN tidaklah mudah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Timor Leste adalah ketergantungan ekonominya pada sektor minyak dan gas yang fluktuatif, serta ketidakstabilan politik yang pernah terjadi pasca kemerdekaan. Dalam konteks ini, ASEAN dipandang sebagai platform regional yang dapat mendukung stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi Timor Leste, dengan berbagai peluang yang dapat membantu negara ini berkembang lebih cepat. Setelah kemerdekaan, Timor Leste menghadapi masalah ekonomi yang serius, dengan produk domestik bruto (PDB) yang rendah dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Sektor minyak dan gas yang menjadi andalan perekonomian negara ini juga sangat rentan terhadap fluktuasi harga energi global, yang menyebabkan ketidakpastian ekonomi. Selain itu, ketergantungan terhadap sumber daya alam dan keterbatasan kapasitas kelembagaan memperburuk situasi. Keanggotaan dalam ASEAN menjadi solusi potensial untuk mengurangi ketergantungan ekonomi ini, serta memberikan akses lebih besar kepada pasar internasional, kerjasama teknis, dan pendanaan pembangunan.

Dalam hal ini menurut penulis, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami mengapa Timor Leste memilih ASEAN sebagai jalur strategis untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan mengatasi ketidakstabilan politik. Meskipun Timor Leste memiliki potensi besar dalam sumber daya alam dan sektor pertanian, kerjasama regional dengan ASEAN memberikan peluang untuk memperbaiki infrastruktur dan membangun kapasitas manusia yang krusial. Selain itu, hubungan antar negara di ASEAN sangat bergantung pada prinsip kerjasama ekonomi dan sosial, yang dapat membantu Timor Leste mempercepat diversifikasi ekonomi dan memperkuat posisi diplomatiknya di kawasan Asia Tenggara dan dunia internasional.

Selain itu, penulis juga menggunakan sudut pandang perkembangan terbaru dalam proses integrasi Timor Leste, dengan memperbarui pemahaman tentang bagaimana perubahan geopolitik dan ekonomi memengaruhi keputusan negara-negara ASEAN terkait keanggotaan

Timor Leste. Dalam konteks ini, penulis menyoroti peluang jangka panjang yang dapat diperoleh Timor Leste dari integrasi ASEAN, baik dalam hal kerjasama ekonomi maupun pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur. Pendekatan ini memberikan kontribusi pada studi mengenai pembangunan ekonomi berkelanjutan dan stabilitas politik negara yang baru merdeka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya yang ditulis oleh penulis, memberikan rumusan masalah yang kemudian menjadi pertanyaan penulis terhadap peneliti ini adalah **“Mengapa Timor Leste ingin bergabung dengan ASEAN”**

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk dapat menjelaskan bagaimana Timor Leste masuk kedalam ASEAN dengan teori interdependensi (ketergantungan) kompleks atau *Complex Interdependence Theory* dari Joseph Nye dan Robert Keohane yang menjadi alat Analisis kepentingan negara Timor Leste dalam menjadi negara anggota ASEAN.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Akademis

Dengan adanya penelitian Analisis Kepentingan Nasional Negara Timor Leste dalam menjadi Negara Anggota ASEAN Tahun 2011-2022 diharapkan memberikan dampak dan kontribusi dalam mengembangkan teori dan konsep dari ekonomi politik internasional dengan menggunakan studi kasus baru. Selain itu, analisis kepentingan nasional negara Timor Leste yang baru diresmikan menjadi negara anggota di tahun 2022 setelah sekian lama merupakan hal yang baru sehingga penggunaan dari penelitian ini dapat menjadi salah satu bentuk referensi dalam teori ekonomi politik internasional.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi pengetahuan baru mengenai teori ekonomi politik internasional dapat menjadikan studi kasus baru. Para pembaca dari kalangan berlatar belakang pendidikan contohnya mahasiswa dan mahasiswi dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan baru dalam menganalisis permasalahan kasus yang ditulis pada penelitian ini dengan landasan teori dan konseptual dari ekonomi politik internasional dengan studi kasus masuknya negara Timor Leste menjadi bagian ASEAN secara resmi. Selain itu, dapat dipergunakan untuk menambah referensi pada kajian studi ilmu hubungan internasional.

1.4 Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian ini tentunya tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Penelitian sebelumnya yang serupa sangat dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian ini. Penulis menyertakan beberapa penelitian terdahulu untuk menegaskan orisinalitas penelitian ini. Studi literatur terdahulu menjadi bahan pendukung dalam melakukan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini peneliti merujuk beberapa penelitian.

Penelitian yang pertama berjudul *“Romania – New E.U. Member State, A New Phase Of Its Transition”* karya **Alina Profiroiu, Laura Mina, dan Marian Nica** tahun 2011 berisi tentang tantangan yang dihadapi negara Rumania pada masa transisi dari bentuk negara berkembang menjadi negara demokratis yang mana merupakan salah satu syarat keanggotaan di *European Union* atau Uni Eropa. Uni Eropa memilih konsep tata kelola demokratis yang didefinisikan dengan tata kelola yang bersifat transparan dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan partisipasi serta memastikan dari suatu supremasi hukum. Sebelumnya, Rumania mendapatkan skor yang dianggap masih tinggi dalam menjadi keanggotaan yaitu 3.36 dan berada di posisi kelompok demokrasi semi - konsolidasi. Rumania harus mendapatkan skor sekitar 1 hingga 2.99. Inti tata kelola demokratis adalah adanya negara berkembang melakukan transisi (melakukan perubahan) dan sektor masyarakat yang saling berinteraksi dengan negara,

sektor swasta, dan masyarakat sipil lain. Jurnal ini menjelaskan jika Rumania berhasil mengatasi masa transisi dan menjadi bagian negara anggota Uni Eropa dengan melakukan perubahan dari negara yang berfokus pada perekonomian ke arah administrasi publik setelah 17 tahun lamanya.

Administrasi publik yang demokratis dan efisien adalah salah satu elemen kunci yang menentukan tingkat modernisasi suatu negara sehingga keadaan dari administrasi publik merupakan indikator yang dapat dikatakan sesuai dalam mengidentifikasi fase transisi suatu negara. Penggunaan administrasi publik oleh organisasi Uni Eropa adalah untuk mempromosikan prinsip serta nilai dari pemisahan antar fungsi politik dan administrasi, menciptakan dan memperkuat pegawai sipil yang mana sebagai karir baru lebih ke arah profesional dan netral dan yang paling penting lebih mengutamakan proses pengambilan keputusan kepada warga, otonomi pengambilan keputusan; transparansi; penyederhanaan administrasi dan penghormatan terhadap warga negara; delegasi kompetensi dan dekonsentrasi layanan; perlindungan hak warga negara⁸.

Studi ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama menyoroti upaya negara berkembang untuk bergabung dalam organisasi internasional regional sebagai jalan menuju peningkatan status dan kapasitas negara agar lebih sejalan dengan standar negara-negara maju. Persamaan lainnya dapat dilihat dari logika penerimaan anggota yang bergantung pada legitimasi dan keputusan kolektif negara anggota yang sudah tergabung, di mana suara mayoritas menjadi indikator dukungan politik yang penting dalam proses akses. Oleh karena itu, studi Rumania menjadi pembanding awal untuk memahami bagaimana penyesuaian domestik dan kebutuhan penguatan kapasitas negara dapat menjelaskan alasan Timor Leste perlu memperkuat dirinya sebelum benar-benar siap menjadi anggota ASEAN.

⁸ Alina Profiroiu, Laura Mina, dan Marian Nica, "Romania – New E.U. Member State, A New Phase Of Its Transition", Vol. 33, hal. 277-294.

Penelitian kedua berasal dari artikel yang berjudul *“Negotiating For Eu Membership? The Case Of Bulgaria And Romania”* dari Pavlina Nikolova tahun 2006 mengenai bagaimana proses negara Bulgaria dan Rumania dalam mengajukan keanggotaan Uni Eropa melalui akses. Bulgaria dan Rumania bergabung ke Uni Eropa pada gelombang kedua akses. Keikutsertaan kedua negara didasarkan adanya alokasi geografis mereka yang sama dan arah reformasi domestik yang meragukan pada tahun-tahun pertama transisi. Pada gelombang kedua di tahun 2000an ditandai dengan *Association Agreement*, dengan kedua negara diberikan rintangan tambahan untuk membuka negosiasi dengan menunda keanggotaan. Negosiasi akses adalah mekanisme utama untuk mengikat UE dan Bulgaria dan Rumania, tetapi kedua calon UE memiliki sedikit ruang tawar-menawar⁹. Artikel ini pula menjelaskan bagaimana proses menjadi keanggotaan meskipun terdapat kondisi umum di luar perjanjian deklarasi negara anggota, akan tetapi terdapat tahapan - tahapan negosiasi dari pra negosiasi hingga pasca negosiasi. Selain itu, Uni Eropa juga ingin menguji kepatuhan dari negara Bulgaria dan Rumania melalui syarat politik dan ekonomi.

Berdasarkan kedua studi pustaka terdahulu diatas, Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan kajian penulis karena sama-sama menjelaskan logika keanggotaan organisasi regional yang dipengaruhi faktor geografis dan kesesuaian kebijakan domestik, sebagaimana Bulgaria dan Rumania berada dalam satu kawasan dengan UE, Timor Leste juga berada dalam kawasan Asia Tenggara bersama ASEAN. Jurnal ini juga menunjukkan bahwa calon anggota harus mampu membuktikan kesiapan administratif dan kesanggupan menjalankan norma organisasi, yang paralel dengan tantangan Timor Leste dalam memenuhi pilar-pilar ASEAN. Dengan demikian, penelitian ini penting bagi penulis untuk menegaskan bahwa proses keanggotaan

⁹ Pavlina Nikolova, 2006, “Negotiating For Eu Membership? The Case Of Bulgaria And Romania”,

tidak hanya bergantung pada kedekatan kawasan, tetapi juga pada kesiapan institusional dan kepatuhan terhadap agenda organisasi regional.

Penelitian ketiga berasal dari tesis yang berjudul **Upaya Timor Leste untuk bergabung dalam ASEAN** yang ditulis oleh **Xavier**¹⁰. Jurnal tersebut membahas Upaya Diplomasi Timor Leste untuk Bergabung dalam ASEAN. Timor Leste menempuh diplomasi dengan menggunakan pendekatan negosiasi dan persuasif melalui saluran komunikasi bilateral maupun forum-forum regional. Dalam upayanya menjadi anggota ASEAN, Timor Leste juga menerapkan Multi-Track Diplomacy, yang melibatkan berbagai pihak seperti lembaga non-pemerintah, akademisi, penyedia pendanaan, dan media. Keterlibatan pihak-pihak ini bertujuan untuk memberikan masukan dan mendukung integrasi Timor Leste ke dalam ASEAN secara menyeluruh.

Studi ini memiliki kesamaan yang sangat jelas dengan penelitian penulis karena sama-sama menempatkan Timor Leste sebagai objek kajian dalam konteks keanggotaan ASEAN. Namun perbedaannya terletak pada fokus analisis, karena Xavier menekankan bentuk dan jalur upaya diplomatik, sementara penelitian penulis menitikberatkan pada analisis kepentingan nasional Timor Leste sebagai dasar rasionalitas negara dalam periode 2011–2022. Oleh sebab itu, tesis ini menjadi landasan empiris yang membantu penulis menjelaskan “bagaimana cara” Timor Leste bergerak menuju ASEAN, sedangkan penelitian penulis melengkapi ruang analisis “mengapa kepentingan nasional” menjadi pendorong utama dari gerak tersebut.

Penelitian keempat berasal dari jurnal yang berjudul **Upaya-Upaya Timor Leste Menjadi Anggota ASEAN Tahun 2012** oleh **Flaviano Moniz**¹¹. Jurnal tersebut membahas tentang bagaimana upaya Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN. Mulai dari

¹⁰ Xavier, 2016 “Upaya Timor Leste untuk bergabung dalam ASEAN” , Tesis, Yogyakarta: Jurusan Hubungan Internasional ,Universitas Gadjah Mada, hal.5

¹¹ Flaviano Moniz, 2012 “Upaya-upaya Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN tahun 2012” ,

tahun 2012 ini Timor Leste menjalin hubungan dengan negara-negara lain, organisasi internasional, dan kawasan. Mengingat posisi geografisnya yang berada di kawasan Asia Tenggara, pemerintah Timor Leste memutuskan untuk mengajukan keanggotaan di ASEAN. Untuk mewujudkan tujuan ini, pemerintah Timor Leste melakukan berbagai upaya agar menjadi anggota ASEAN, dengan target awal yang ditetapkan adalah tahun 2012.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat aspirasi Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN yang didorong pertimbangan geografis dan kebutuhan integrasi kawasan. Namun perbedaannya terletak pada fokus waktu dan pendekatan, karena Moniz menyoroti upaya menuju target tahun 2012 dan menggunakan konsep regionalisme serta kebijakan luar negeri, sedangkan penelitian penulis menegaskan gap dengan menganalisis kepentingan nasional Timor Leste dalam rentang yang lebih luas, yakni 2011–2022, serta mengaitkannya dengan kerangka interdependensi kompleks. Dengan demikian, penelitian Moniz memperkuat dasar historis dan deskriptif tentang upaya Timor Leste, sementara penelitian penulis memperdalam dimensi kepentingan nasional sebagai penjas utama motif integrasi.

Penelitian kelima berasal dari **The Struggle of Becoming the 11th Member State of ASEAN: Timor Leste's Case** dari Rr. Mutiara Windraskinasih, Arie Afriansyah yang membahas mengenai analisis proses penerimaan Timor Leste sebagai anggota ASEAN menggunakan sudut pandang hukum organisasi internasional dengan melibatkan isi Piagam ASEAN dan instrumen ASEAN lainnya. Artikel ini juga memberikan penjelasan bagaimana perbedaan bagaimana penerimaan anggota ASEAN ketika adanya Deklarasi dan Piagam ASEAN. ASEAN yang pada umumnya dibentuk oleh 5 negara semakin berkembang memiliki banyak anggota. Dalam hal ini, ASEAN menginginkan transformasi baru dengan mengadopsi mode operasi informal yang mana terbentuknya Deklarasi ASEAN yang menyatakan bahwa ASEAN merupakan Asosiasi Kerjasama Regional yaitu kehendak kolektif negara-negara Asia

Tenggara untuk mengikatkan diri bersama dalam persahabatan dan kerja sama¹². Pada artikel ini juga menyebutkan jika keanggotaan Timor Leste dilakukan berdasarkan Piagam ASEAN sedangkan keanggotaan Kamboja, Laos, Malaysia, dan Vietnam di tahun 1990 berdasarkan Deklarasi ASEAN yang lebih ke arah keputusan informal.

Perubahan masa Deklarasi dan Piagam ASEAN menjadi perbedaan dari penelitian ini dengan artikel diatas dimana keanggotaan Timor Leste dilakukan secara hukum yang berlaku secara internasional dan formal bukan lagi menggunakan hubungan informal atau hanya sekedar memiliki latar letak geografi saja. Melainkan terdapat hukum lain yang mengacu perlu adanya pertimbangan dan keputusan yang matang untuk menjadikan Timor Leste sebagai keanggotaan ASEAN ke-11 meskipun membutuhkan waktu yang cukup panjang yaitu dari tahun 2011 hingga 2022 saat ini ketika Timor Leste resmi menyandang gelar tersebut.

Artikel ini juga menegaskan adanya pergeseran dasar penerimaan anggota ASEAN dari era Deklarasi yang lebih informal menuju era Piagam ASEAN yang lebih legal-formal, sekaligus membandingkan kasus Timor Leste dengan beberapa negara anggota terdahulu yang masuk dalam konteks Deklarasi. Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas bahwa syarat geografis saja tidak cukup, melainkan perlu kesiapan kapasitas untuk menjalankan kewajiban organisasi. Perbedaannya, artikel ini dominan pada dimensi legalitas prosedural, sedangkan penelitian penulis memusatkan perhatian pada kepentingan nasional Timor Leste yang dianalisis melalui *complex interdependence theory*. Karena itu, artikel ini menjadi basis normatif yang memperkuat argumen penulis bahwa penerimaan Timor Leste merupakan proses formal yang memerlukan pertimbangan matang, sementara penelitian penulis menjelaskan dorongan kepentingan strategis yang membuat Timor Leste tetap konsisten mengejar keanggotaan tersebut.

¹² Rr. Mutiara Windrakinah dan Afrie Arie Afriansyah, "The Struggle of Becoming the 11th Member State of ASEAN: Timor Leste's Case", Brawijaya Law Journal, Vol. 5 No. 1, 2018

Tabel 1. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Judul	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil Penelitian
1	Alina Profiroiu, Laura Mina, & Marian Nica “Romania – New E.U. Member State, A New Phase Of Its Transition”	Jenis penelitian kualitatif eksploratif dimana dalam artikel ini tidak menggunakan teori maupun konsep untuk alat analisis sehingga perlu dikaji lebih mendalam yang tujuannya memahami dan mengeksplorasi inti dari permasalahan. Hal ini dikarenakan belum banyak yang mengkaji penelitian atau isu ini.	Rumania mulai merubah sistem pemerintahannya untuk dapat menjadi keanggotaan Uni Eropa dengan cenderung menghentikan sebagian besar reformasi pra-aksesi dan melanjutkan jalur transisi. Akan tetapi, Rumania termasuk dalam negara yang tidak cukup kuat ketika menghadapi kritis pada masa transisi.
2	Pavlina Nikolova “Negotiating For Eu Membership? The Case Of	Jenis penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dari tahap - tahap negosiasi	Pada artikel ini lebih menekankan pada tahapan pra dan pasca negosiasi aksesinya dibandingkan hasil yang diberikan setelah

	Bulgaria And Romania”		<p>bernegosiasi dengan pihak Uni Eropa. Syarat keanggotaan Uni Eropa ketika Rumania dan Bulgaria mendaftar menjadi anggota dengan ketika Turki dan Kroasia membuktikan bahwa kriteria dari kesepakatan Kopenhagen adalah ketentuan yang harus disamaratakan. Karena pembukaan negosiasi aksesinya merupakan dasar penting untuk semua calon keanggotaan. Sehingga setiap calon negara anggota seharusnya memiliki keinginan dan kemampuan yang sesuai dengan kepentingan khusus per negaranya. Selain itu, kapasitas administratif dan hukum</p>
--	--------------------------	--	--

			<p>calon negara anggota menjadi tolak ukur untuk menilai kesiapan dari calon negara tersebut.</p>
3	<p>Hermenegildo Xavier “Upaya Timor Leste untuk bergabung dalam ASEAN”</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif.</p>	<p>Dalam penelitian ini penulis menjelaskan perjuangan keinginan Timor Leste untuk bergabung menjadi negara anggota ASEAN Timor Leste juga menggunakan Multi Track Diplomacy yang melibatkan semua lembaga non pemerintah, akademik, pendanaan dan Media sebagai liputan dari lembaga- lembaga tersebut demi terintegrasi Timor Leste dalam ASEAN.</p>

4	<p>Flaviano Moniz</p> <p>“Upaya-Upaya Timor Leste Menjadi Anggota ASEAN Tahun 2012”</p>	<p>Jenis penelitian ini menggunakan konsep Regionalisme dan kebijakan luar negeri dan teknik yang digunakan adalah teknik pengumpulan data library research dan teknik analisa data deskriptik.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini bisa mengetahui bagaimana Timor Leste melakukan upaya-upaya menjadi anggota ASEAN. salah satu upaya yang dilakukan Timor Leste adalah membuka sekretariat ASEAN di Dili.</p>
5	<p>Rr. Mutiara Windraskinasih & Arie Afriansyah</p> <p>“The Struggle of Becoming the 11th Member State of ASEAN: Timor Leste’s Case”</p>	<p>Jenis penelitian adalah kualitatif deskriptif dimana menggunakan metode hukum organisasi internasional dan menjelaskan tiap sub bab.</p>	<p>Kasus keanggotaan ASEAN mengalami pergeseran dari menggunakan dasar Deklarasi menjadi Piagam ASEAN sebagai suatu instrumen penyusun. Timor Leste menjadi negara pertama yang mengajukan keanggotaan dengan penggunaan Piagam ASEAN sehingga dikatakan kasus ini adalah hal unik.</p>

			<p>Penggunaan syarat geografi tidaklah cukup untuk menjadikan Timor Leste anggota perlu adanya syarat atau kriteria lain agar keputusan ASEAN lebih tepat. Selain itu, kemampuan dan kapasitas yang dimiliki Timor Leste masih dipertanyakan dalam menjalankan kewajibannya sehingga ini menjadi salah satu keanggotaan Timor Leste masih belum diputuskan pada tahun 2011 hingga sebelum tahun 2022.</p>
--	--	--	---

Penelitian ini membedakan diri dari penelitian sebelumnya dengan fokus utama pada kepentingan nasional Timor Leste dalam bergabung dengan ASEAN, menggunakan teori interdependensi kompleks dari Joseph Nye dan Robert Keohane sebagai kerangka analisis utama. Sementara penelitian sebelumnya lebih menyoroti proses negosiasi dan diplomasi Timor Leste untuk menjadi anggota ASEAN, penelitian ini lebih mendalam membahas aspek ekonomi, khususnya ketergantungan Timor Leste pada sektor minyak dan gas, serta bagaimana

negara ini dapat memanfaatkan integrasi ekonomi ASEAN untuk mendiversifikasi ekonominya. Penggunaan teori interdependensi kompleks memungkinkan penulis untuk menggali bagaimana Timor Leste dapat mengoptimalkan kerja sama ekonomi dan politik dengan negara-negara ASEAN untuk mencapai tujuan nasionalnya, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Xavier (2012), lebih terfokus pada upaya diplomasi dan pengaruh eksternal dalam proses akses, sementara penelitian ini menekankan analisis internal terhadap kepentingan negara.

Selain itu, penelitian ini memperbarui perspektif mengenai keanggotaan Timor Leste di ASEAN dengan membahas perkembangan terbaru, yaitu penetapan status Timor Leste sebagai anggota ASEAN pada tahun 2022. Sumber daya alam Timor Leste, khususnya minyak dan gas, menjadi komoditas penting dalam ekonomi negara yang tergantung pada kerjasama multilateral, terutama dalam kerangka ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC). Penelitian sebelumnya, seperti penelitian oleh Windraskinasih dan Afriansyah (2020), lebih menyoroti hambatan administratif dan ekonomi yang dihadapi Timor Leste dalam proses bergabung dengan ASEAN, namun penelitian ini mengidentifikasi peluang jangka panjang yang ditawarkan oleh keanggotaan ASEAN, seperti akses pasar yang lebih luas, peningkatan infrastruktur, dan pengurangan ketergantungan pada sektor migas. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pemahaman bagaimana integrasi regional dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di negara berkembang seperti Timor Leste.

1.5 Teori dan Konsep

1.5.1 Teori Interdependensi Kompleks

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori interdependensi (ketergantungan) kompleks atau *Complex Interdependence Theory* dari Joseph Nye dan Robert Keohane yang dipublikasikan pada tahun 1977 dalam jurnalnya yang berjudul *Power and Interdependence*.

Dalam jurnal ini, Keohane dan Nye berpendapat pada masa globalisasi saat ini, dengan negara satu dengan yang lainnya semakin terhubung, maka negara semakin tidak dapat bertindak secara independen. Hal ini dikarenakan adanya hubungan negara-negara akan mempengaruhi kebijakan dan keputusan negara itu sendiri. Sehingga, Interdependensi kompleks menggambarkan situasi di mana negara-negara saling bergantung dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, dan sosial, tanpa adanya hierarki kekuasaan yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan militer bukanlah satu-satunya alat untuk mencapai tujuan nasional, dan banyak saluran komunikasi yang terlibat dalam hubungan internasional¹³.

Keohane dan Nye mengidentifikasi tiga karakter utama dari interdependensi kompleks. Pertama, adanya *multiple channels*, yaitu hubungan internasional tidak hanya terjadi melalui jalur diplomasi formal antarpemerintah, tetapi juga melalui saluran lain seperti organisasi internasional, perusahaan multinasional, lembaga donor, organisasi non-pemerintah, komunitas akademik, dan jaringan transnasional. Kedua, *absence of hierarchy of issues*, yaitu isu-isu internasional tidak selalu tersusun dalam hierarki tetap; isu ekonomi, energi, pembangunan, kesehatan, dan pendidikan dapat menjadi sama pentingnya dengan isu keamanan. Ketiga, *minor role of military force*, yaitu penggunaan kekuatan militer cenderung berkurang relevansinya dalam banyak isu lintas negara, terutama ketika negara-negara mengutamakan stabilitas ekonomi dan keuntungan bersama yang lebih konkret¹⁴.

Menurut Keohane dan Nye terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi adanya ketergantungan kompleks antar negara dalam urusan politik ekonomi internasional yaitu:

1. *Force and Economic Power*

Force power dalam kerangka Keohane & Nye bisa dipahami sebagai kapasitas negara untuk mencapai tujuan politiknya melalui kekuatan koersif,

¹³Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, "Power and Interdependence", *Survival*, (London: Routledge, 1977), hal. 158- 165.

¹⁴ *Ibid.*

terutama instrumen militer dan ancaman penggunaan kekerasan. Dalam pendekatan realis klasik, *force power* dianggap pilar utama *national power* karena terkait langsung dengan *survival* negara. Ukurannya bisa terlihat dari kemampuan militer (personel, persenjataan, teknologi pertahanan), strategi deteren, kapasitas proyeksi kekuatan, serta legitimasi politik domestik untuk menggunakan kekerasan. Namun, Keohane & Nye tidak mengatakan *force power* hilang total. Mereka menekankan bahwa dalam banyak isu kontemporer khususnya ekonomi dan pembangunan *force power* menjadi kurang efektif atau bahkan tidak relevan, terutama ketika hubungan antarnegara sudah terikat dalam jaringan ketergantungan dan institusi. Dengan kata lain, militer tetap penting untuk isu keamanan eksistensial, tetapi tidak selalu menjadi alat paling rasional untuk memenangkan tujuan ekonomi-politik sehari-hari.

Konsep *force* merujuk pada penggunaan atau ancaman penggunaan kekuatan fisik terutama kekuatan militer sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku negara atau aktor lain dalam hubungan internasional. *Force* dipandang sebagai bentuk kekuasaan yang paling koersif karena tujuannya adalah memaksa pihak lain untuk menerima kepentingan, kebijakan, atau keputusan tertentu melalui ancaman atau tindakan kekerasan. Dalam kerangka interdependensi kompleks yang digambarkan Keohane dan Nye, *force* tetap merupakan instrumen *power*, tetapi semakin mengalami keterbatasan efektivitas karena dunia modern ditandai oleh hubungan ekonomi, diplomasi, dan institusi internasional yang saling mengikat. Meskipun demikian, penggunaan *force* tidak sepenuhnya hilang, karena masih relevan dalam isu keamanan dan konteks tertentu yang berkaitan dengan pertahanan negara. Dengan demikian, *force* menurut Keohane dan Nye merupakan instrumen

dominasi berbasis kekuatan militer yang tetap ada dalam politik internasional, namun perannya menjadi lebih terbatas dibandingkan era hubungan internasional tradisional.

Sementara itu, *economic power* adalah kemampuan negara untuk mencapai kepentingan nasional melalui instrumen ekonomi, baik yang bersifat *reward* (insentif) maupun *punishment* (tekanan). Bentuknya dapat berupa fasilitasi perdagangan, pembukaan akses pasar, investasi, bantuan pembangunan, transfer teknologi, kerja sama infrastruktur, pembiayaan, atau sebaliknya embargo, tarif, pembatasan impor-ekspor, hingga sanksi ekonomi. Dalam kerangka interdependensi kompleks, *economic power* menjadi semakin dominan karena dua hal: (1) biaya penggunaan kekerasan semakin tinggi secara politik dan ekonomi; (2) keuntungan ekonomi lebih mudah diukur dan dibagi dalam kerja sama regional. Di sini, negara tidak lagi hanya mengejar “menang secara militer”, melainkan berusaha memaksimalkan pertumbuhan, stabilitas, dan legitimasi pemerintahan melalui jejaring ekonomi dan institusi.

2. *Linkage and Interdependence*

Pergeseran dari *force power* ke *economic power* menimbulkan ketegangan antara negara - negara adidaya dalam melindungi sekutunya dari ancaman maupun tekanan politik. Sejauh para pemimpin suatu negara menganggap negaranya tidak terlalu bergantung pada negaranya dibandingkan negara-negara mitra aliansi militer lainnya, maka negara tersebut mungkin tergoda untuk menggunakan ketergantungan negaranya yang lebih kecil pada bidang militer untuk mendapatkan keuntungan ekonomi³. Definisi saling ketergantungan memiliki dua konsep yang berbeda. Pertama, saling ketergantungan dapat dikatakan sebagai kepekaan secara timbal balik yaitu

mengukur sejauh mana perubahan pada suatu negara yang mempengaruhi perubahan di negara lain. Hal ini dapat dikatakan sesuai pada tingkatan proses karena adanya struktur hubungan dari para aktor yang peka terhadap pihak lain dalam berbagai tingkatan. Sedangkan definisi lain mengatakan jika saling ketergantungan berdasarkan pada kerentanan relatif dimana biaya relatif dari suatu alternatif yang ada bagi pihak. Contohnya pada negara yang kurang bergantung adalah negara yang memiliki biaya yang relatif rendah akibat penghentian atau perubahan drastis dalam hubungan tersebut. Maka definisi ini dianggap sesuai dengan tingkat struktural. Sehingga dalam *game theory*, definisi dari suatu negara yang tidak terlalu bergantung memiliki kemampuan untuk mengubah restrukturisasi matriks pembayaran dan memungkinkan untuk memanipulasi tujuan nasionalnya.

3. *A New Balance of Power*

Kemunculan negara - negara adidaya baru menciptakan keseimbangan baru dalam kekuatan atau a new balance of power. Dalam hal ini terdapat istilah segitiga militer yaitu negara Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok sedangkan pada segitiga ekonomi terdapat Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Pembahasan segitiga ekonomi memfokuskan pada pentingnya economic power seperti mengenai isu - isu ekonomi, pertimbangan status dan kekuasaan, permintaan dalam negeri akan sumber daya, pendapatan nasional dan lapangan kerja, dibandingkan dengan keuntungan dengan negara lain. Peningkatan relatif dalam kekuatan ekonomi sebagian besar merupakan produk sampingan dari keberhasilan kinerja nasional yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini sangat bertolak belakang dengan model perimbangan kekuasaan yang bersifat militer-politik, yang mana keuntungan mutlak dalam

kekuasaan militer tidak dicari untuk kepentingan mereka sendiri, melainkan semata-mata demi keuntungan relatif yang bisa diperoleh lawan potensial mereka. Oleh karena itu, permainan ekonomi lebih jauh dari permainan strategis model 'zero-sum' di mana keuntungan dan kerugian saling meniadakan. Maka a new balance of power merupakan suatu bentuk kekuatan yang mana suatu negara akan bertindak untuk melindungi dirinya dengan membatasi kemampuan negara atau koalisi yang kuat terkecuali hal tersebut bertentangan dengan tujuan dalam memperoleh kekayaan atau keuntungan secara substansial. Pemerintah negara memungkinkan untuk mengorbankan kekuasaan relatif mereka jika terjadi tekanan politik demi keuntungan ekonomi riil negara mereka.

4. *New Actors and Issues*

Perubahan bentuk kekuatan menghasilkan peningkatan kompleksitas aktor dan isu dalam politik dunia pula. Menurut Keohane dan Nye terdapat empat elemen yang menonjol yaitu:

- a. Meningkatnya keragaman jenis aktor, khususnya aktor non-negara, dalam politik dunia;
- b. Perluasan agenda kebijakan luar negeri sebagai akibat dari meningkatnya kepekaan masyarakat satu sama lain di wilayah yang sebelumnya dianggap murni domestik;
- c. Meningkatnya kesulitan yang dihadapi negara-negara dalam menjaga koherensi kebijakan;
- d. Semakin besarnya kemungkinan keterkaitan antara berbagai jenis permasalahan.

Kemunculan aktor - aktor baru dalam politik dunia dari aktor transnasional maupun antar pemerintah dengan berbagai macam karakteristik berbeda menimbulkan permasalahan. Contohnya pada perusahaan multinasional dan gerakan transnasional yang memperumit pola interaksi dari antar negara serta memberikan masalah baru dalam kebijakan luar negeri dari dampak kompleks investasi asing, organisasi antar pemerintah, dan lainnya. Selain aktor baru, adanya isu - isu baru juga menjadi permasalahan lain. Seperti kebijakan moneter internasional yang tidak hanya semata sebagai hasil dari tindakan dan interaksi antar negara, perilaku perusahaan multinasional dan bank multinasional, aktivitas pegawai negeri sipil internasional, dan dampaknya. mengenai kebijakan nasional, forum diskusi yang dilembagakan juga harus diperhitungkan. Salah satu dampak penting dari aktor-aktor baru dalam politik dunia adalah peran mereka sebagai sabuk transmisi yang menyebarkan kepekaan kebijakan melintasi batas- batas negara. Ketika ranah pengambilan keputusan di perusahaan, bank, dan (pada tingkat lebih rendah) serikat pekerja melampaui batas-batas negara, berbagai kebijakan dalam negeri saling bertabrakan, dan dampak ini diperkuat oleh komunikasi transnasional, yang terjadi bahkan di negara-negara maju. tidak adanya organisasi. Mereka dapat membantu pemerintah negara dalam membuat suatu kebijakan luar negeri dalam lintas batas negara.

5. *Policy Coordination*

Adanya agenda kebijakan yang lebih luas dengan aktor yang beragam pula menyebabkan negara - negara khususnya negara Barat mengalami kesulitan dalam mempertahankan kapasitasnya untuk melakukan tindakan yang berkelanjutan dan konsisten dalam berbagai isu. Kesulitan-kesulitan yang

dialami dalam menjaga koherensi sebagian dapat ditelusuri dari semakin sulitnya mempertahankan hierarki tujuan tradisional di bawah tekanan. Kesulitan pertama adalah dari perubahan isu-isu dalam agenda. Lalu kesulitan kedua ialah perbaikan dalam teknologi komunikasi dan transportasi yang memungkinkan kontak yang lebih besar antara kedua belah pihak. Ketika suatu negara diperlakukan sebagai sebuah unit, sudah lazim untuk mengakui adanya berbagai kepentingan dalam negeri namun menganggap kepentingan-kepentingan tersebut berada di bawah hierarki 'kepentingan nasional' dengan keamanan nasional sebagai prioritas utama. Sehingga perlu memilah tujuan-tujuan dari ekonomi dan disesuaikan oleh individu - individu tertentu untuk mencapai kepentingan nasional bersama.

6. *Linkage Strategies*

Pasca peristiwa Perang Dunia II menimbulkan dampak utama bagi struktur ekonomi yaitu relatif terisolasinya kegiatan ekonomi internasional sehari - hari dari permasalahan kebijakan luar negeri. Dalam bukunya *Transnational Relations and World Politics*, Keohane dan Nye berpendapat bahwa pembatasan agenda perundingan antar negara secara sengaja sangat membantu dalam mencapai hubungan kerja sama dan saling menguntungkan di bidang ekonomi. Masa transisi saat ini dalam urusan politik ekonomi internasional menciptakan ketidakstabilan dan kompleksitas yang kondusif pada linkage strategies. Maka, Keohane dan Nye menyampaikan jika keterkaitan antar isu perlu untuk dijelaskan secara luas dalam kaitannya dengan ketidaksesuaian dalam sistem yang terlibat: yaitu, sejauh hasil dari suatu isu yang diambil secara terpisah berbeda dari hasil yang diharapkan jika dikaitkan dengan pertanyaan lain, keterhubungan harus diharapkan. Meskipun negara -

negara akan mengalami kesulitan akan hal ini dikarenakan negara yang dicirikan sebagai fragmentasi birokrasi dan inkoherensi kebijakan yang menyebabkan hubungan antar isu - isu yang disampaikan di atas menjadi terbatas. *Linkage strategies* memainkan peran penting dalam urusan politik dunia di masa mendatang daripada ketika di tahun 1970.

7. *The Leadership Lag*

Pentingnya kepemimpinan dengan melibatkan kesediaan suatu negara dalam mengorbankan keuntungan jangka pendek dalam perundingan alokatif ditujukan untuk melestarikan suatu struktur. Investasi dalam struktur ini dapat diberikan pertama yaitu ketika suatu negara memiliki kepentingan yang lebih besar dalam suatu isu dan memandang dirinya sebagai konsumen utama dari manfaat yang dihasilkan oleh struktur tersebut dalam jangka panjang, atau yang kedua adalah ketika suatu negara besar dengan tujuan yang luas memandang dirinya sendiri sebagai konsumen utama dari manfaat yang dihasilkan oleh struktur tersebut dalam jangka panjang. Periode kepemimpinan yang lambat dapat menyebabkan politisasi karena permasalahan tawar - menawar dalam hal sehari - hari yang tidak terisolasi dari permasalahan perubahan struktural serta tidak adanya aktor yang bersedia dalam membayar biaya yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan tertentu yang bertujuan menjaga kepercayaan terhadap legitimasi sistem secara keseluruhan. Seperti saat ini (tahun 1970) era kepemimpinan masih dipegang oleh Amerika Serikat yang diarahkan untuk mengubah struktur hubungan moneter dan perdagangan.

Keohane dan Nye memperjelas tentang ketergantungan kompleks dimana mereka mengidentifikasi saling ketergantungan kompleks menjadi tiga ciri utama¹⁵:

¹⁵ *Op.Cit, Nye & Keohane*, Hal. 725 - 753

1. Tidak tersusunnya tujuan kebijakan negara hierarki yang stabil, namun dapat berubah-ubah;
2. Adanya berbagai saluran kontak antar masyarakat memperluas jangkauan instrumen kebijakan, sehingga membatasi kemampuan kantor luar negeri untuk mengontrol hubungan luar negeri pemerintah;
3. Kekuatan militer sebagian besar tidak relevan.

Keohane dan Nye mendefinisikan saling ketergantungan kompleks mempengaruhi tujuan dan instrumen kebijakan negara. Maka dalam proses politik harus dibatasi pada keterkaitan isu, pembentukan agenda, dan peran organisasi internasional. Dalam hal ini, Keohane dan Nye lebih memfokuskan pada pentingnya peran organisasi internasional. Mereka memandang organisasi internasional bukan sebagai sumber hukum definitif, namun sebagai entitas yang melembagakan jaringan kebijakan dan di dalamnya koordinasi kebijakan trans pemerintahan dan pembentukan koalisi dapat dilakukan. Selain itu, mereka berpendapat bahwa organisasi internasional tampaknya memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap agenda negara, dan pengaruh negara terhadap hasil, dibandingkan dalam hubungan moneter internasional¹⁶. Selanjutnya, Keohane mengintegrasikan pandangan mengenai organisasi internasional kedalam teori rezim internasional. Penggunaan rezim internasional untuk menunjukkan bagaimana saling ketergantungan kompleks dapat digunakan pada analisis empiris yang sistematis sehingga dapat dijelaskan secara meluas sebagai konsep deskriptif dengan cakupan kelompok mulai dari aturan, institusi, dan praktik.

Dalam jurnalnya yang lain, Keohane menuliskan jika para sarjana mulai menerima pandangan tentang kekuasaan dan persaingan politik adalah kunci utama dari

¹⁶ *Ibid.*

politik dunia Adapun hal lain yang disimpulkan yaitu adanya pengaruh institusi terhadap proses. Institusi menciptakan kemampuan bagi negara untuk saling bekerja sama cara yang bermanfaat dengan mengurangi biaya pembuatan dan penegakan perjanjian yang mana hal ini disebut “*transaction costs*”.

Menurut Keohane, adanya rezim internasional diakibatkan karena ketergantungan terhadap analisis *rational-choice theory* dimana para aktor yang memiliki kepentingan pribadi dalam perpolitikan dunia memiliki kepentingan pribadi masing - masing sehingga pada keadaan atau situasi tertentu, mereka ,membutuhkan rezim internasional melalui kesepakatan bersama dan dapat memperhitungkan fluktuasi jumlah, luas, dan kekuatan internasional dari waktu ke waktu dengan melihat perhitungan rasional suatu negara. Pada penelitian sebelumnya, *rational-choice theory* lebih menekankan pada *theory of hegemonic stability* yaitu pandangan bahwa pemusatan kekuasaan pada suatu negara yang dominan dapat memfasilitasi berkembangnya negara - negara kuat lainnya.

Dengan adanya penjelasan seperti diatas, penulis cenderung menggunakan faktor ketergantungan kompleks yaitu *Force and Economic power, Linkage and Interdependence power*. Hal ini dikarenakan keempat faktor tersebut lebih dapat dipergunakan sebagai alat analisis nantinya. Untuk faktor *Force and Economic power*, penulis memfokuskan pada *Economic Power* karena pada saat ini negara Timor Leste lebih cenderung ke arah memperbaiki dan meningkatkan perekonomiannya dibandingkan dari segi militer. Maka, penggunaan kedua faktor itu kemudian penulis akan jelaskan melalui operasionalisasi penelitian.

Tabel 1.2 Operasionalisasi Penelitian

Indikator	Definisi	Analisis
<i>Economic</i>	Penggunaan instrumen	Timor Leste yang masih

<p>Power</p>	<p>ekonomi lebih menguntungkan suatu negara dibandingkan penggunaan kekerasan dan senjata yang menimbulkan banyak korban jiwa. Instrumen ekonomi digunakan sebagai reaksi terhadap situasi kekerasan mencapai nasional. pengganti untuk kepentingan</p>	<p>dianggap negara baru yang belum memiliki perekonomian yang stabil membutuhkan koalisi untuk membantu meningkatkan perekonomian mereka. Koalisi tersebut adalah organisasi regional seperti ASEAN yang merupakan koalisi terdekat Timor Leste itu sendiri.</p>
<p>Linkage and Interdependence</p>	<p>Definisi ketergantungan saling memiliki dua konsep yang berbeda. Pertama, saling ketergantungan dapat dikatakan sebagai kepekaan secara timbal balik yaitu mengukur sejauh mana perubahan pada suatu negara yang mempengaruhi perubahan di negara lain. Hal ini dapat dikatakan sesuai pada tingkatan proses karena</p>	<p>Koalisi tersebut juga nantinya dapat menjadi pendorong Timor Leste untuk lebih memajukan kehidupan masyarakat mereka melalui tingkat perekonomian di negara negara tetangganya. Ini merupakan analisis Timor Leste di faktor <i>Linkage and Interdependence</i>. Dimana dengan masuk ke ASEAN Timor Leste dapat memperbaiki</p>

	<p>adanya struktur hubungan dari para aktor yang peka terhadap dalam tingkatan. definisi lain mengatakan pihak lain Sedangkan berbagai ketergantungan berdasarkan kerentanan dimana biaya relatif dari suatu alternatif yang ada bagi pihak.</p>	<p>mengembangkan perekonomian dan mereka khususnya. Hal ini kemudian yang memungkinkan Timor Leste dianggap memiliki nilai ketergantungan pada negara lain.</p>
--	--	---

Faktor *economic power* pada Timor Leste merupakan hal yang utama dimana seperti yang diketahui jika perekonomian Timor Leste masih dianggap kurang dibandingkan dengan Negara - Negara ASEAN lainnya. Sehingga pada saat ini mereka harus dituntut untuk dapat mengimbangi perekonomian negara ASEAN lainnya untuk dapat bergabung. Keinginan Timor Leste untuk menjadi keanggotaan ASEAN dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dr. Richard Pomfret dari Universitas Adelaide di awal tahun 2013 yang didanai oleh Asian Development Bank. Penelitian ini dilakukan atas mandat dari ACCWG (*ASEAN Coordinating Council Working Group*) yaitu badan yang dibentuk koordinator ASEAN untuk menilai kesiapan suatu negara masuk dalam organisasi ini. Meskipun tidak ada publikasi karena akses sepenuhnya hak kekayaan intelektual atas dokumen tersebut adalah studi milik ASEAN. Akan tetapi, dalam hal ini Timor Leste tetap mengambil langkah inisiatif pada aspek ekonomi khususnya. Seperti pemerintah yang telah memberikan

bantuan teknis untuk persiapan daerah integrasi ekonomi sejak tahun 2013¹⁷.

Timor Leste sebagai negara pascakemerdekaan dengan kapasitas ekonomi dan institusi yang masih berkembang cenderung memprioritaskan *economic power* untuk mengatasi keterbatasan domestik. Bergabung dengan ASEAN dapat dipahami sebagai strategi memperluas akses pasar, menarik investasi, meningkatkan kapasitas birokrasi, dan memperkuat pembangunan manusia. Dalam konteks ini, ASEAN berfungsi sebagai “koalisi ekonomi-politik terdekat” yang menyediakan jaringan kerja sama, norma, dan mekanisme integrasi yang tidak bisa dicapai melalui instrumen militer. Karena itu, dorongan Timor Leste untuk masuk ASEAN selaras dengan logika interdependensi kompleks: mengamankan kepentingan nasional lewat jalur ekonomi dan institusi, bukan lewat ekspansi kekuatan militer.

Hal ini kemudian membangun ketergantungan antar negara - negara ASEAN lainnya yang disebut sebagai *Linkage and Interdependence*. Dengan ikut serta ke organisasi regional ASEAN, dapat mendorong Timor Leste dalam mencapai tujuan nasional negaranya dengan langkah pertamanya adalah memperbaiki, menumbuhkan dan meningkatkan tingkat perekonomian negaranya. Ketergantungan antar negara dapat mengubah pola pikir negara lain dalam memutuskan kebijakan luar negeri mereka. Hal ini sesuai dengan definisi dari *game theory* dalam hubungan internasional, jika negara yang kurang bergantung antar negara dapat menyebabkan persepsi lain oleh negara lain. Dan memungkinkan mereka untuk lebih memperhatikan tujuan negara tersebut di dalam suatu koalisi seperti mengikuti organisasi ASEAN.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

¹⁷ Rr. Mutiara Windraskinasi dan Arie Afriansyah, “The Struggle of Becoming the 11th Member State of ASEAN: Timor Leste’s Case”, *Law Journal. Journal of Legal Studies* Vol. 5 No.1, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2017)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan dari penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan pengukuran data dalam menganalisis latar belakang dan pembahasan masalah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian sosial yang diartikan untuk mencoba mencari pola spesifik, hubungan sebab akibat, dan hubungan antara teori atau konsep yang digunakan dengan studi kasus atau fenomena yang diambil¹⁸.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanatif kualitatif. Bungin menjelaskan bahwa penelitian eksplanatif adalah penelitian yang menjelaskan sebuah fenomena dengan pengaruh dari suatu variabel satu terhadap variabel lainnya¹⁹. Penelitian eksplanatif sendiri juga dijelaskan sebagai instrumen untuk mencari hubungan sebab akibat dari variabel yang ada dalam penelitian dengan menggunakan teori dan konsep yang ada.

1.6.2 Tingkat Analisa

Untuk menjelaskan fenomena pada penelitian maka diperlukan level analisa yang tepat. Level analisa sendiri merupakan target dari objek analisa yang digunakan dalam penelitian yang mana akan membantu penulis untuk mendapatkan gambaran (*description*), penjelasan (*explanation*), dan perkiraan (*prediction*) dari tindakan yang dilakukan oleh negara²⁰. Secara umum, analisis dalam Hubungan Internasional dibagi menjadi lima tingkatan, yaitu: tingkat individu, tingkat kelompok-individu, tingkat negara-bangsa, tingkat kelompok negara (regional), dan tingkat sistem global.²¹

Sebelum menentukan tingkat analisis, peneliti perlu menetapkan unit analisis dan unit eksplanasi sebagai alat bantu untuk mengarahkan penelitian dan menentukan hasilnya.

¹⁸ Bungin Burhan. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 51.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ J. David Singer, The Level-of-Analysis Problem in International Relations, World politics Vol, 14, No, 1, United Kingdom: Cambridge University, Hal. 78-80

²¹ Yessi Olivia, Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional, Jurnal Transnasional, Vol. 5, No. 1 (Juli 2013), Riau: Universitas Riau, Hal 898-899.

Unit analisis berperan sebagai variabel dependen, sedangkan unit eksplanasi berperan sebagai variabel independen. Dalam penelitian ini, unit analisis yang digunakan adalah kepentingan Timor Leste untuk bergabung dengan ASEAN dengan tingkat analisis pada level negara-bangsa. Sementara itu, unit eksplanasinya adalah ASEAN dengan tingkat analisis pada level kelompok negara (regional). Berdasarkan tingkat analisis tersebut, penelitian ini termasuk tipe deduksionis, karena unit analisisnya lebih kecil dibandingkan unit eksplanasinya.

1.6.3 Variabel Penelitian

Penulis melihat aktor - aktor negara dari Timor Leste dalam berupaya menjadi keanggotaan ASEAN. Dalam penelitian ini penulis membagi permasalahan tersebut menjadi variabel independent dan variabel dependen. Dimana variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepentingan Timor Leste masuk anggota ASEAN. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah ASEAN.

Dalam unit analisis dan unit eksplanasi adalah suatu hal penting untuk menentukan tingkatan analisis. Unit analisis merupakan unit yang bersifat dependen. Unit analisis sendiri adalah bagian dari yang akan diamati ataupun diteliti, dapat berupa gambar, kata, kalimat, paragraf, adegan, dan lainnya. Dalam hubungan internasional seringkali negara sebagai objek utama penelitian. Untuk unit eksplanasi yaitu unit yang bersifat independen dimana dapat disebut sebagai suatu objek yang dapat mempengaruhi unit analisis melakukan tindakan tersebut.

Maka pada penelitian ini, unit eksplanasinya ialah alasan Timor Leste untuk bergabung ke organisasi regional ASEAN. Sedangkan unit analisisnya merupakan kepentingan secara rasionalitas dari Timor Leste ingin bergabung.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

a. Batasan Materi

Agar penelitian ini pembahsannya tidak tidak terlalu lebar. Penulis memilih batasan materi dengan mendeskripsikan analisis kepentingan nasional Timor Leste menjadi anggota ASEAN. Sebelum adanya pernyataan bahwa Timor Leste menjadi anggota ASEAN, Timor Leste diberi status negara peninjau dan diperbolehkan mengikuti rangkaian acara ASEAN termasuk KTT. Berdasarkan fenomena diatas, penulis tertarik pada upaya dan keseriusan Timor Leste dalam menjadi negara anggota ASEAN sehingga penulis ingin melakukan penelitian terhadap analisis kepentingan nasional Timor Leste dalam menjadi negara anggota ASEAN.

b. Batasan Waktu

Penelitian ini menggunakan dengan temuan data berdasarkan batasan waktu yang ditetapkan penulis yaitu dari tahun 2002 ketika Timor Leste merdeka hingga tahun 2022 dimana Negara Timor Leste telah dinyatakan secara resmi menjadi bagiandari ASEAN.

1.6.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dan sarana pengumpulan data melalui metode *library research* dan studi literatur. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menggali sumber data dari berbagai sumber yang dapat ditemukan melalui library research, seperti buku, jurnal internasional, skripsi, surat kabar, serta media elektronik seperti internet. Data-data yang diperoleh akan dianalisis dan disusun oleh penulis dalam berbagai bab pembahasan sesuai dengan format dan konsep penulisan karya ilmiah untuk mencapai hasil penelitian yang diharapkan.

1.7 Hipotesa

Hipotesis utama penelitian ini adalah bahwa kepentingan Timor Leste untuk bergabung menjadi anggota ASEAN pada periode 2011–2022 didorong terutama oleh kebutuhan memperkuat pembangunan ekonomi dan memperluas ketergantungan kerja sama kawasan, bukan oleh pertimbangan kekuatan militer. Dalam kerangka *Complex Interdependence* Joseph

Nye dan Robert Keohane, negara-negara tidak lagi sepenuhnya mengandalkan instrumen *force power* untuk mencapai tujuan nasional, melainkan lebih menekankan instrumen ekonomi serta perluasan saluran kerja sama lintas isu dan aktor. Bagi Timor Leste sebagai negara pascakemerdekaan dengan kapasitas ekonomi dan institusional yang masih berkembang, ASEAN diposisikan sebagai koalisi regional paling relevan untuk mempercepat integrasi, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis ini diperkuat melalui dua penjelasan turunan. Pertama, *Economic Power* menjadi dorongan utama Timor Leste, karena keanggotaan ASEAN diyakini membuka akses terhadap pasar yang lebih luas, peluang perdagangan, arus investasi, serta dukungan penguatan kapasitas pembangunan yang sulit dicapai secara unilateral. Dengan demikian, upaya akses Timor Leste bukan sekadar langkah simbolik politik kawasan, melainkan strategi ekonomi untuk meningkatkan daya saing nasional, mendorong diversifikasi sektor produktif, dan mengurangi kerentanan akibat ketergantungan pada sumber pendapatan tertentu. Kedua, melalui *Linkage and Interdependence*, Timor Leste memandang bahwa semakin intensnya keterhubungan dengan negara-negara ASEAN sebelum keanggotaan penuh akan membentuk kebutuhan interdependensi yang lebih formal dan berkelanjutan, sehingga status keanggotaan ASEAN menjadi instrumen penting untuk memperkuat legitimasi, stabilitas, dan posisi tawar Timor Leste dalam agenda regional.

Dengan demikian, penelitian ini mengasumsikan bahwa semakin besar kebutuhan Timor Leste terhadap penguatan ekonomi dan semakin tinggi kebutuhan membangun keterhubungan regional yang stabil, maka semakin kuat pula rasionalitas kebijakan luar negeri Timor Leste untuk mengejar keanggotaan ASEAN pada 2011–2022. Dalam konteks ini, ASEAN berperan sebagai arena institusional yang tidak hanya menyediakan ruang integrasi ekonomi, tetapi juga menjadi platform pembentukan jejaring kebijakan, koordinasi, serta penguatan kapasitas negara anggota baru sebagaimana logika interdependensi kompleks.

1.8 Struktur Penelitian

Di dalam sub bab ini, penulis menjabarkan bagian – bagian yang ada. Sehingga didapat struktur penulisan yang terbagi menjadi empat bab, yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Struktur Penelitian

BAB	ISI
BAB 1	PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1 Tujuan Penelitian 1.3.2 Manfaat Penelitian 1.3.2.1 Manfaat Akademis 1.3.2.2 Manfaat Praktis 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Teori dan Konsep 1.5.1 Interdependensi Ketergantungan Kompleks 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian 1.6.2 Tingkat Analisa 1.6.3 Variabel Penelitian

	<p>1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian</p> <p>1.6.5 Teknik dan Alat Pengumpulan Data</p> <p>1.7 Hipotesa</p> <p>1.8 Struktur Penelitian</p>
BAB 2	<p>GAMBARAN UPAYA TIMOR LESTE BERGABUNG DALAM ASEAN</p> <p>2.1 Arti Penting ASEAN Bagi Timor Leste</p> <p>2.2 Usulan Timor Leste Untuk Bergabung Dalam ASEAN</p> <p>2.3 Tanggapan Negara-Negara ASEAN Atas Usulan Timor Leste</p> <p>2.4 Penetapan Status Timor Leste</p>
BAB 3	<p>ASEAN DALAM PERSPEKTIF TIMOR LESTE</p> <p>3.1 <i>Force Power & Economic Power</i> dalam Relasi Timor Leste dan ASEAN</p> <p>3.2 <i>Linkage and Interdependence</i> dalam Timor Leste dan ASEAN</p> <p>3.3 Kepentingan Timor Leste Bergabung Dalam ASEAN</p>
BAB 4	<p>PENUTUP</p> <p>4.1 Kesimpulan</p> <p>4.2 Saran</p>

